

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Simpulan**

Setelah meneliti usaha kepatuhan pemerintah Afrika Selatan terhadap CEDAW, yang dianalisis mendalam dengan *public policy trichotomy* Ronald B. Mitchell, ditemukan bahwa Afrika Selatan telah berhasil pada tahap *output* dan *outcomes*, tetapi masih belum berhasil pada tahap *impact*. Pada tahap *output*, Afrika Selatan berhasil karena pemerintah Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Cyril Ramaphosa telah melakukan hal-hal berikut: (1) mengamandemen 3 Undang-Undang terkait GBV yaitu: Criminal Related Matters Amendment Act 12 of 2021, Criminal Law Amendment Act 13 of 2021 dan Domestic Violence Amendment Act 14 of 2021 dan (2) membentuk divisi resmi di bawah pemerintah Afrika Selatan bernama *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* yang secara khusus membuat *report* dan menangani kasus GBV.

Pada tahap *outcomes*, telah terlihat perubahan perilaku di masyarakat Afrika Selatan antara lain: (1) memasukkan kurikulum baru mengenai kesetaraan *gender* di beberapa universitas Afrika Selatan dan pembentukan komite khusus di universitas untuk menangani kasus GBV di lingkup universitas, (2) minat yang tinggi di kalangan remaja laki-laki di sekolah-sekolah menengah Afrika Selatan dalam dialog personal mengenai kesetaraan *gender* dan mengatasi GBV yang diselenggarakan

oleh pemerintah, (3) program edukasi dan pelatihan mengenai GBV dan sensitivitas terhadap korban GBV untuk anggota SAPS dan (4) pembentukan ERAP yang berisi rancangan anggaran spesifik dan poin-poin yang menjadi fokus pemerintah dalam menangani GBV di Afrika Selatan.

Yang terakhir, yaitu pada tahap *impact*, sayangnya masih terdapat beberapa halangan. Peneliti menemukan bahwa implementasi ERAP belum efektif, alokasi dana ERAP yang belum tepat sasaran dan masih tingginya angka GBV di Afrika Selatan hingga saat ini.

Berdasarkan data-data yang telah ditemukan peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa Afrika Selatan masuk ke kuadran 4 (*Good Faith Non-Compliance*) klasifikasi *High-Low Compliance and Effectiveness* dan masuk ke kategori *non-compliance due to inadvertence* menurut Ronald B. Mitchell. Afrika Selatan masuk ke kategori tersebut karena Afrika Selatan telah melakukan berbagai usaha menyeluruh untuk mematuhi CEDAW, namun kapasitas Afrika Selatan masih berada pada tahap *outcomes*. Belum terlihat perubahan kualitas yang signifikan di masyarakat Afrika Selatan terkait GBV setelah CEDAW diimplementasikan pada 2019 hingga 2023.

Lebih lanjut, dari hasil temuan peneliti juga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat faktor utama yang menyebabkan upaya penerapan CEDAW di Afrika Selatan masih memasuki kuadran 4. *Pertama*, tingginya keraguan bagi perempuan Afrika Selatan untuk melaporkan tindak *marital rape* yang dialami. *Kedua*, budaya masyarakat

Afrika Selatan yang menganggap bahwa *marital rape* adalah masalah keluarga, sehingga merupakan ranah privasi yang tidak sepatasnya untuk dipublikasikan. *Ketiga*, budaya pemberian mas kawin (*dowry*) yang masih tinggi, sehingga sebagai balasan atas mas kawin yang mahal, perempuan diharapkan untuk selalu memenuhi ekspektasi dan permintaan pihak pria. *Keempat*, mispersepsi bahwa seorang suami tidak dapat melakukan pemerkosaan karena hubungan seksual dilakukan dalam ikatan pernikahan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

#### **4.2. Saran**

Penelitian ini memiliki limitasi yaitu hanya mengangkat kasus pemerkosaan sebagai fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan meneliti jenis kekerasan lainnya yang termasuk ke dalam GBV, seperti *sexual assault*, *emotional assault*, *femicide*, dan sebagainya. Penelitian lain juga dapat dilakukan dengan kerangka teori lain untuk memberikan kontribusi berupa perspektif lain dalam menganalisis kasus GBV di Afrika Selatan. Adapun salah satu contoh saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah menganalisis pengaruh budaya terhadap maraknya kasus GBV di Afrika Selatan menggunakan kacamata teori konstruktivisme.